

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Arifin, Tatang M, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: Penerbit Radjawali Pers, 1996.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Barulzaman, Mariam Darus, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2001.
- Djohansah, J, “*Pengadilan Niaga*” dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Perseroan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: Penerbit UMM Press, 2008.
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UGM, 1981.
- Ibrahim, *et. al.*, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta: Penerbit FH Ubhara Press, 2015.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Muljadi, Mukjadi, “*Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*”, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Nugroho, Riant dan Siahaan, Ricky, *BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Nurdin, Andriani, *Kepailitan BUMN Persero: Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012.
- Prasetya, Rudhy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.

- Radjagukuguk, Erman, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Sastrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Jakarta: Penerbit Tata Nusa, 1999.
- Soemitro, Rochmat, *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Bandung: PT Eresco, 1976.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Poesoko, Herowati, *Hak Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta: Penerbit LaksBang PRESSindo, 2011.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Usman, Rakhmadi, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Kementerian BUMN Republik Indonesia, Surat Menteri BUMN Nomor S-164/MBU/2011 tanggal 01 April 2011.

C. Sumber Lainnya

Ali, Chadir, dalam Ridwan Khairandy, “*KONSEPSI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vo.26-Nomor1-Tahun 2007.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.*, Wakil Ketua MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008

Kementerian BUMN, *Profil BUMN Indonesia*, Edisi 2013, Jakarta, 2013.

Neysa S, Uray Yanice, *Kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst)*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.

Noviana, Nina, “*Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke 36 Nomor 2.

Safitri, Fahriza Nurul, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus Perseroan Terbatas Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero)*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2012.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajahmada,1993.

www.bisnis.com.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbc1bcd43fa9/pengadilan-boleh-sita-harta-bumn>.

www.zulkarnainsitompul.wordpress.com.

<http://www.tempo.co/read/news/2011/09/29/090358951/Istaka-Karya-Akan-Ditutup>.

<http://www.tempo.co/read/news/2011/09/29/090358951/Istaka-Karya-Akan-Ditutup>.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/20/1650351/Kreditur.Berda-mai.Istaka.Karya.Lolos.dari.Pailit>

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/12/25/16085711/Pengesahan.Perdamaian.Istaka.Terancam.Berantakan>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbc1bcd43fa9/pengadilan-boleh-sita-harta-bumn>

<http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/00269-uji-materi-uu-keuangan-negara-ditolak-mk-beri-batas-bisnis/>

